



14 Kabupaten/Kota di Kalbar Diduga

**Rugikan Negara  
Rp 105,709 M**



Pontianak, BERKAT.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan 14 pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat diduga merugikan

LANJUTAN  
BACA HAL 11

**Rugikan Negara Rp 105,709 M .....dari Hal 1**

negara Rp 105,709 miliar dengan 1540 temuan.

"Kerugian negara paling besar dipegang oleh Kota Pontianak senilai Rp 26 miliar dengan 115 kasus," katanya di Pontianak, Selasa (30/4).

Indeks kerugian negara ini, kata Uchok, merupakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diperbaiki Pemerintah Daerah, tetapi tidak sesuai standar BPK. "Atau, temuan BPK, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, mulai tahun 2008 hingga tahun 2012," katanya.

Indikasi kerugian negara tersebut, diantaranya saldo persediaan barang cetakan sebesar Rp 427 juta tidak dapat diyakini kewajarannya.

Setelah Kota Pontianak, lanjut Uchok Sky Khadafi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang merugikan negara terbanyak kedua yaitu Kabupaten Melawi yang mencapai Rp 20,275 miliar dengan 218 kasus.

"Untuk Melawi, ada temuan belanja hibah dan bantuan sosial sebesar Rp 900 juta dan tidak didukung proposal bantuan dan bukti-bukti penyaluran," jelasnya.

Kemudian, Kabupaten Pontianak Rp 10,155 miliar dengan 80 kasus, Kabupaten Sekadau Rp 9,3 miliar dengan 105 kasus, Kabupaten Kayong Utara Rp 7,4 miliar dengan 86 kasus.

Kemudian, Kabupaten Sintang Rp 7,029 miliar dengan 130 kasus, Kabupaten Sanggau Rp 5,4 miliar dengan 89 kasus, Kabupaten Ketapang Rp 5,2 miliar dan 217 kasus, Kabupaten Landak Rp 4,1 miliar dengan 42 kasus, Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 3,6 miliar dengan 73 kasus, Kota Singkawang Rp 3,3 miliar dengan 177 kasus, Kabupaten Bengkayang Rp 3,2 miliar dengan 161 kasus dan Kabupaten Sambas sebesar Rp 619 juta dengan 47 kasus.

"Untuk Kabupaten Kubu Raya bukan tidak ada, tetapi ada kerugian negara sebesar Rp 759 juta dan sudah dikembalikan ke kas negara," kata Uchok.

Ia berpesan bagi kepala-kepala daerah yang akan mencalonkan diri pada pemilihan umum kepala daerah untuk tidak

"Kalau masih ada utang, sebaiknya tidak mencalonkan diri. Karena dalam pejabat publik dan pengelolaan keuangan negara saja sudah jelek. Apalagi ke depannya," kata Uchok Sky Khadafi. (nia)